



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

LAPORAN KEUANGAN 2018



SATPOL PP

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BLORA





PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BLORA
PERIODE
1 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

BAB I
PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Blora yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora selaku Pengguna Anggaran harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran keuangan di entitasnya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan tersebut berupa penyajian Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah. Adapun landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 25 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blora;
- Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora;
- Peraturan Bupati Blora Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora;
- Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Neraca
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Total anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Blora adalah sebesar Rp. 9.147.434.000,00. Setelah perubahan dalam APBD Perubahan Kabupaten Blora tahun 2018, total anggaran menjadi sebesar Rp. 9.335.834.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 188.400.000,00 (2,06%). Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung	3.500.000.000,00	3.559.400.000,00	59.400.000,00	1,70 %
Belanja Langsung	5.647.434.000,00	5.776.434.000,00	129.000.000,00	2,28 %
Total Anggaran	9.147.434.000,00	9.335.834.000,00	188.400.000,00	2,06 %

Pada mata anggaran Belanja Tidak Langsung mengalami perubahan jumlah anggaran, semula sebesar Rp. 3.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 3.559.400.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 59.400.000,00 (1,70%).

Sedangkan pada mata anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.647.434.000,00 menjadi Rp. 5.776.434.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 129.000.000,00 (2,28%).

Penambahan jumlah anggaran Belanja Langsung terjadi pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 24.400.000,00 (3,95%) dengan rincian:

- Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 15.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 22.500.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 7.500.000,00 (50,00%).
- Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 21.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 24.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp.3.000.000,00 (14,29%).

- Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 20.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 22.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 2.000.000,00 (10,00%).
 - Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 25.675.000,00 menjadi sebesar Rp. 43.675.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 18.000.000,00 (70,11%).
 - Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 8.650.000,00 menjadi sebesar Rp. 12.650.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 4.000.000,00 (46,24%).
 - Kegiatan Penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 27.100.000,00 menjadi sebesar Rp. 31.100.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 4.000.000,00 (14,76%).
 - Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 70.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 39.800.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 30.200.000,00 (43,14%).
 - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 90.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 106.100.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 16.100.000,00 (17,89%).
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertambah sebesar Rp. 327.600.000,00 (47,82%) dengan rincian:
- Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 0,00 menjadi sebesar Rp. 118.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 118.000.000,00 (0,00%).
 - Kegiatan Pengadaan mebel, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 95.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 103.100.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 8.100.000,00 (8,53%).
 - Kegiatan Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 400.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 525.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 125.000.000,00 (31,25%).
 - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 65.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 87.500.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 22.500.000,00 (34,62%).

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 125.000.000,00 menjadi sebesar Rp.179.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 54.000.000,00 (43,20%).

Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertambah sebesar Rp.19.000.000,00 (9,27%) dengan rincian:

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 205.000.000,00 menjadi sebesar Rp.224.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 19.000.000,00 (9,27%).

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan berkurang sebesar Rp. 331.000.000,00 (46,00%) dengan rincian:

- Kegiatan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, jumlah anggaran semula sebesar Rp.95.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 110.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 15.000.000,00 (15,79%).

- Kegiatan Pengendalian keamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 380.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 34.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 346.000.000,00 (91,05%).

Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal bertambah sebesar Rp. 29.000.000,00 (1,12%) dengan rincian:

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah, jumlah anggaran semula sebesar Rp.2.281.940.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.262.940.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 19.000.000,00 (0,83%).

- Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Lain dalam Pencegahan Pelanggaran Perda, jumlah anggaran semula sebesar Rp.25.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 73.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 48.000.000,00 (192,00%).

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran berkurang sebesar Rp. 60.000.000,00 (9,43%) dengan rincian:

- Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 36.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 46.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp.10.000.000,00 (27,78%).

- Kegiatan Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, jumlah anggaran semula sebesar Rp. 503.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 553.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp.50.000.000,00 (9,94%).

Jumlah anggaran tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.015.359.000,00 (9,81%) bila dibandingkan dengan jumlah anggaran tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
Total Anggaran	10.351.193.000,00	9.335.834.000,00	(1.015.359.000,00)	9,81 %

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora tahun 2018 dituangkan ke dalam 11 Program kerja Belanja Langsung, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum;
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
7. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
8. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
9. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
10. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
11. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora pada tahun 2018. Dari 11 Program di atas terbagi menjadi 49 kegiatan Belanja Langsung. Sesuai

dengan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora, Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh fungsi Sekretariat, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Bidang Perlindungan Masyarakat.

Secara keseluruhan total anggaran (setelah perubahan) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Blora tahun 2018 adalah sebesar Rp. 9.335.834.000,00 dan penyerapan anggaran di tahun 2018 sebesar Rp. 9.215.140.910,00 (98,71%).

Anggaran yang terealisasi digunakan untuk menunjang kegiatan operasional selama tahun 2018. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora tidak menghasilkan Pendapatan, sehingga jumlah Pendapatan sebesar Rp. 0,00. Jumlah Anggaran Belanja sebesar Rp. 9.335.834.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.215.140.910,00 (98,71%) terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 8.306.489.810,00 (98,88%) dari anggaran sebesar Rp. 8.400.434.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 908.651.100,00 (97,14%) dari anggaran sebesar Rp. 935.400.000,00. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.534.093.789,00 (99,29%) dari anggaran sebesar Rp. 3.559.400.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.681.047.121,00 (98,35%) dari anggaran sebesar Rp. 5.776.434.000,00.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Secara umum target kinerja yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora Tahun 2018 dinilai baik. Dibanding dengan Tahun 2017, realisasi (prosentase) total belanja Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,55%, secara terinci yaitu belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar 2,42% dan untuk belanja langsung mengalami penurunan sebesar 0,47%. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Belanja	2017	2018	Naik / (Turun)
Belanja Tidak Langsung	96,87 %	99,29 %	2,42 %
Belanja Langsung	98,82 %	98,35 %	(0,47 %)
Total Belanja	98,15 %	98,71 %	0,55 %

Sesuai dengan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora yaitu membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kebakaran (Peraturan Bupati Blora Nomor 70 Tahun 2016, pasal 5), Program dan Kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dampak yang positif terhadap situasi dan kondisi secara umum di wilayah Kabupaten Blora.

Pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya pelayanan Administrasi Perkantoran dengan prosentase 96,86%, yaitu:

- Tersedianya jasa surat menyurat dengan prosentase 98,00%.
- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan prosentase 92,63%.
- Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan prosentase 99,23%.
- Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan prosentase 97,44%.
- Tersedianya jasa administrasi perkantoran dengan prosentase 99,57%.
- Tersedianya jasa kebersihan kantor dengan prosentase 99,69%.
- Tersedianya alat tulis kantor dengan prosentase 97,85%.
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan prosentase 95,42%.
- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan prosentase 99,23%.
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan prosentase 98,75%.
- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan prosentase 99,00%.
- Tersedianya makanan dan minuman dengan prosentase 95,52%.
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan prosentase 97,81%.
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan prosentase 93,77%.

- b. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas dengan prosentase 97,51%, yaitu:
- Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan prosentase 94,28%.
 - Terlaksananya pengadaan mebeler dengan prosentase 99,58%.
 - Terlaksananya pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor dengan prosentase 96,94%.
 - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan prosentase 99,29%.
 - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan prosentase 99,26%.
- c. Meningkatnya kedisiplinan Aparatur dengan prosentase 99,74%, yaitu:
- Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan prosentase 99,89%.
 - Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan prosentase 0,00%.
- d. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan prosentase 0,00%, yaitu:
- Tersusunnya rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja SKPD dengan prosentase 0,00%.
- e. Meningkatnya kelancaran pelayanan dan administrasi umum dengan prosentase 99,73%, yaitu:
- Tersedianya honorarium tenaga kontrak daerah dengan prosentase 99,73%.
- f. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kabupaten Blora dengan prosentase 95,24%, yaitu:
- Meningkatnya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan prosentase 99,47%.
 - Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan prosentase 100,00%.
 - Terlaksananya pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat dengan prosentase 96,60%.
 - Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan dengan prosentase 92,03%.
 - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan prosentase 90,20%.

- Terlaksananya pengendalian keamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan prosentase 77,93%.
 - Terlaksananya penegakan, penindakan pelanggaran Perda dengan prosentase 99,53%.
 - Terlaksananya pelatihan SAR Linmas dengan prosentase 90,82%.
- g. Terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal dengan prosentase 99,65%, yaitu:
- Terlaksananya pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja dengan prosentase 97,96%.
 - Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kejahatan dengan prosentase 99,24%.
 - Terlaksananya kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan dengan prosentase 99,92%.
 - Meningkatnya kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah dengan prosentase 99,66%.
 - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan prosentase 100,00%.
 - Terlaksananya pemberantasan pita cukai palsu dan rokok polos dengan prosentase 99,67%.
 - Meningkatnya kerjasama dengan Aparat lain dalam pencegahan pelanggaran Perda dengan prosentase 100,00%.
- h. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan prosentase 94,21%, yaitu:
- Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di masyarakat dengan prosentase 94,21%.
- i. Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) dengan prosentase 97,12%, yaitu:
- Terlaksananya penyuluhan dan pencegahan peredaran/ penggunaan miras dan narkoba dengan prosentase 97,74%.
 - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan prosentase 94,19%.
- j. Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan prosentase 92,88%, yaitu:
- Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana dengan prosentase 97,25%.

- Terlaksananya pelatihan dan simulasi penanganan bencana dengan prosentase 90,63%.
- k. Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan prosentase 97,96%, yaitu:
 - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran dengan prosentase 95,64%.
 - Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan prosentase 91,56%.
 - Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan prosentase 99,14%.
 - Terlaksananya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dengan prosentase 93,79%.
 - Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dengan prosentase 98,87%.
 - Terlaksananya pengadaan kendaraan pemadam kebakaran dengan prosentase 0,00%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 9.335.834.000,00 terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) jumlah anggaran sebesar Rp. 3.559.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.534.093.789,00 (99,29%) dan Belanja Langsung yang terdiri dari 11 Program terbagi menjadi 49 kegiatan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.776.434.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.681.047.121,00 (98,35%). Dari jumlah total tersebut (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) terealisasi sebesar Rp. 9.215.140.910,00 atau 98,71% dari pagu anggaran. Keseluruhan jumlah Anggaran dan Realisasi per kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Kode Prog /Keg	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.559.400.000,00	3.534.093.789,00	99,29
	Belanja Pegawai	3.559.400.000,00	3.534.093.789,00	99,29
	BELANJA LANGSUNG	5.776.434.000,00	5.681.047.121,00	98,35
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	642.075.000,00	621.898.685,00	96,86
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.940.000,00	98,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.000.000,00	75.031.036,00	92,63
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.500.000,00	22.327.000,00	99,23
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	24.000.000,00	23.384.775,00	97,44
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	105.400.000,00	104.950.000,00	99,57
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22.000.000,00	21.931.000,00	99,69
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.675.000,00	42.736.500,00	97,85

Kode Prog /Keg	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.650.000,00	12.071.000,00	95,42
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.100.000,00	30.860.000,00	99,23
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.800.000,00	39.302.000,00	98,75
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	990.000,00	99,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	29.850.000,00	28.512.000,00	95,52
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	120.000.000,00	117.372.374,00	97,81
19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	106.100.000,00	99.491.000,00	93,77
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.012.600.000,00	987.397.441,00	97,51
05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	118.000.000,00	111.250.000,00	94,28
10	Pengadaan mebel	103.100.000,00	102.665.000,00	99,58
12	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	525.000.000,00	508.922.000,00	96,94
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	87.500.000,00	86.882.100,00	99,29
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	179.000.000,00	177.678.341,00	99,26
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	224.319.000,00	223.744.500,00	99,74
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	224.000.000,00	223.744.500,00	99,89
05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	319.000,00	0,00	0,00
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00	0,00	0,00
05	Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
09	Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum	54.000.000,00	53.853.120,00	99,73
01	Penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah	54.000.000,00	53.853.120,00	99,73
15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	388.500.000,00	369.988.400,00	95,24
01	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	110.000.000,00	109.421.000,00	99,47
03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
04	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat	10.000.000,00	9.660.000,00	96,60
05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	70.000.000,00	64.423.000,00	92,03
06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7.500.000,00	6.765.000,00	90,20
07	Pengendalian keamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah	34.000.000,00	26.495.400,00	77,93

Kode Prog /Keg	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
10	Penegakan, penindakan pelanggaran Perda	80.000.000,00	79.620.000,00	99,53
11	Pelatihan SAR Linmas	37.000.000,00	33.604.000,00	90,82
16	Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.623.440.000,00	2.614.232.000,00	99,65
01	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	35.000.000,00	34.285.000,00	97,96
02	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Tindak Kejahatan	40.000.000,00	39.695.000,00	99,24
03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	30.000.000,00	29.977.000,00	99,92
04	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	2.262.940.000,00	2.255.359.000,00	99,66
05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
10	Pemberantasan pita cukai palsu dan rokok polos	175.000.000,00	174.416.000,00	99,67
11	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Lain dalam Pencegahan Pelanggaran Perda	73.000.000,00	73.000.000,00	100,00
19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	37.000.000,00	34.856.000,00	94,21
01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	37.000.000,00	34.856.000,00	94,21
20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	42.500.000,00	41.274.000,00	97,12
01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	35.000.000,00	34.210.000,00	97,74
08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7.500.000,00	7.064.000,00	94,19
22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	56.000.000,00	52.010.500,00	92,88
01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana	19.000.000,00	18.477.000,00	97,25
05	Pelatihan dan simulasi penanganan bencana	37.000.000,00	33.533.500,00	90,63
23	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	696.000.000,00	681.792.475,00	97,96
05	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	28.000.000,00	26.778.000,00	95,64
08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	50.000.000,00	45.780.000,00	91,56
09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	46.000.000,00	45.604.475,00	99,14
11	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	18.000.000,00	16.883.000,00	93,79
12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	553.000.000,00	546.747.000,00	98,87
14	Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	9.335.834.000,00	9.215.140.910,00	98,71

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Tidak ditemukan hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora sebagai Entitas Akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan secara berkala kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora selaku Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Blora.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 yaitu Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang diterapkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Kebijakan Akuntansi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dengan menerbitkan Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

✓ Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Entitas Pelaporan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Entitas Pelaporan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Entitas Pelaporan.

✓ Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui :

- a. pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan dan telah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada hari kerja yang ditentukan.
- b. Dalam hal Pendapatan disetor pada hari Sabtu diluar hari libur nasional, maka diakui sebagai Pendapatan pada hari Sabtu dan BUD mencatat pada hari kerja berikutnya.
- c. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Entitas Akuntansi dan sudah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan tahun berjalan, sedangkan pendapatan yang belum disetor ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai pendapatan tahun berikutnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

✓ Pengukuran

- a. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran). Pencatatan azas bruto dapat dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan-LRA bersifat variable.

- b. Pengukuran atau penilaian transaksi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan tidak mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai nettonya.

2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

✓ Definisi

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

✓ Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa harus diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.
- b. Terjadinya konsumsi barang/ jasa:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban
 - 2) konsumsi barang/ jasa non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

✓ **Pengukuran**

Pengeluaran belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/ jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.

Beban dicatat sebesar :

- a. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.
- b. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
- c. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.

3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

✓ **Definisi**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Blora terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

✓ **Pengakuan**

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

✓ **Pengukuran**

- a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4. Kebijakan Akuntansi Aset

✓ **Definisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

✓ **Pengakuan**

Aset diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan kepada Pemerintah Kabupaten Blora;

✓ **Pengukuran**

Nilai aset diukur sebesar harga perolehannya.

5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

✓ **Definisi**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

✓ **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

✓ **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

✓ **Definisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Blora.

✓ **Pengakuan**

Perubahan Ekuitas diakui apabila ada perubahan kenaikan atau penurunan ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora.

✓ **Pengukuran**

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00. Hal ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora bukan merupakan Instansi penghasil pendapatan.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 9.215.140.910,00 atau mencapai 98,71% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 9.335.834.000,00.

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1. PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
2. BELANJA	9.335.834.000,00	9.215.140.910,00	10.159.967.294,00

Rincian anggaran dan realisasi tersebut diuraikan di bawah ini:

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1. PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00

Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 0,00**. Hal ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora bukan merupakan Instansi penghasil pendapatan.

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2. BELANJA	9.335.834.000,00	9.215.140.910,00	10.159.967.294,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 9.215.140.910,00** atau **98,71%** dari

anggaran sebesar **Rp. 9.335.834.000,00**. Terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 8.306.489.810,00 atau 98,88%; realisasi Belanja Modal sebesar Rp.908.651.100,00 atau 97,14%.

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2.1 BELANJA OPERASI	8.400.434.000,00	8.306.489.810,00	7.705.117.044,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 8.306.489.810,00** atau **98,88%**. Terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.966.757.789,00 atau 99,39% dan Belanja Barang sebesar Rp. 2.339.732.021,00 atau 97,60%.

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2.1.1 Belanja Pegawai	6.003.223.000,00	5.966.757.789,00	5.506.829.194,00

Pada Tahun 2018 Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 6.003.223.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.966.757.789,00 atau 99,39%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a. Gaji dan Tunjangan	2.555.200.000,00	2.539.572.589,00	2.568.800.394,00
b. Tambahan Penghasilan PNS	1.004.200.000,00	994.521.200,00	863.388.800,00
c. Honorarium PNS	213.989.000,00	212.740.000,00	153.440.000,00
d. Honorarium Non PNS	2.229.834.000,00	2.219.924.000,00	1.921.200.000,00
Total Belanja Pegawai	6.003.223.000,00	5.966.757.789,00	5.506.829.194,00

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini :

a. Gaji dan Tunjangan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Gaji pokok PNS/uang representasi	1.952.700.000,00	1.944.341.000,00
- Tunjangan keluarga	199.000.000,00	195.646.378,00
- Tunjangan jabatan	146.700.000,00	145.995.000,00
- Tunjangan fungsional umum	74.400.000,00	73.995.000,00
- Tunjangan beras	109.200.000,00	107.471.280,00
- Tunjangan PPh/tunjangan khusus	2.200.000,00	2.127.958,00
- Pembulatan gaji	500.000,00	28.387,00
- Iuran asuransi kesehatan	55.500.000,00	55.121.784,00
- Iuran asuransi kecelakaan kerja dan kematian	15.000.000,00	14.845.802,00
Total Gaji dan Tunjangan	2.555.200.000,00	2.539.572.589,00

b. Tambahan Penghasilan PNS	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1.004.200.000,00	994.521.200,00
Total Tambahan Penghasilan PNS	1.004.200.000,00	994.521.200,00

c. Honorarium PNS	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Honorarium panitia pelaksana dan peserta kegiatan PNS	105.340.000,00	105.340.000,00
- Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	3.250.000,00	2.450.000,00
- Honorarium pengelola administrasi keuangan dan barang daerah	105.399.000,00	104.950.000,00
Total Honorarium PNS	213.989.000,00	212.740.000,00

d. Honorarium Non PNS	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	1.837.164.000,00	1.834.164.000,00
- Honorarium panitia pelaksana dan peserta kegiatan non PNS	392.670.000,00	385.760.000,00
Total Honorarium Non PNS	2.229.834.000,00	2.219.924.000,00

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2.1.2 Belanja Barang	2.397.211.000,00	2.339.732.021,00	2.198.287.850,00

Pada Tahun 2018 Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp. 2.397.211.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.339.732.021,00 atau 97,60%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a. Belanja Bahan Pakai Habis	355.630.000,00	334.721.116,00	249.390.400,00
b. Belanja Jasa Kantor	91.000.000,00	84.991.036,00	88.950.700,00
c. Belanja Premi Asuransi	1.836.000,00	1.689.120,00	153.000,00
d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	219.050.000,00	218.367.750,00	160.872.700,00
e. Belanja Cetak & Penggandaan	41.966.000,00	39.742.000,00	34.225.050,00
f. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	600.000,00	1.300.000,00
g. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	20.000.000,00	29.000.000,00
h. Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor	12.640.000,00	11.840.000,00	15.300.000,00
i. Belanja Makanan dan Minuman	452.980.000,00	440.362.000,00	504.011.000,00
j. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	192.280.000,00	192.280.000,00	192.775.000,00

k. Belanja Pakaian Kerja	60.320.000,00	60.310.000,00	91.370.000,00
l. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	319.000,00	0,00	0,00
m. Belanja Perjalanan Dinas	881.890.000,00	872.101.999,00	768.519.000,00
n. Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	22.327.000,00	25.871.000,00
o. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	44.200.000,00	40.400.000,00	36.550.000,00
Total Belanja Barang	2.397.211.000,00	2.339.732.021,00	2.198.287.850,00

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini :

a. Belanja Bahan Pakai Habis	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja alat tulis kantor	43.675.000,00	42.736.500,00
- Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	31.100.000,00	30.860.000,00
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	2.940.000,00
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	9.931.000,00
- Belanja bahan bakar minyak/gas	108.955.000,00	89.513.616,00
- Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	5.000.000,00	5.000.000,00
- Belanja barang kebutuhan peserta diklat/sosialisasi	142.600.000,00	142.600.000,00
- Belanja spanduk	7.300.000,00	7.300.000,00
- Belanja baliho/banner	4.000.000,00	3.840.000,00
Total Belanja Bahan Pakai Habis	355.630.000,00	334.721.116,00

b. Belanja Jasa Kantor	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja telepon	10.000.000,00	8.363.906,00
- Belanja air	9.000.000,00	8.970.000,00
- Belanja listrik	71.000.000,00	66.667.130,00

- Belanja surat kabar/majalah	1.000.000,00	990.000,00
Total Belanja Jasa Kantor	91.000.000,00	84.991.036,00

c. Belanja Premi Asuransi	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja premi asuransi kesehatan	1.836.000,00	1.689.120,00
Total Belanja Premi Asuransi	1.836.000,00	1.689.120,00

d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja jasa service	36.150.000,00	36.130.000,00
- Belanja penggantian suku cadang	140.744.000,00	140.708.725,00
- Belanja pelumas	18.156.000,00	18.144.250,00
- Belanja jasa KIR	500.000,00	0,00
- Belanja surat tanda nomor kendaraan	23.500.000,00	23.384.775,00
Total Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	219.050.000,00	218.367.750,00

e. Belanja Cetak dan Penggandaan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja cetak	18.935.000,00	18.590.000,00
- Belanja penggandaan	23.031.000,00	21.152.000,00
Total Belanja Cetak dan Penggandaan	41.966.000,00	39.742.000,00

f. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00	600.000,00
Total Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	600.000,00	600.000,00

g. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja sewa sarana mobilitas darat	20.000.000,00	20.000.000,00
Total Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	20.000.000,00

h. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja sewa meja kursi	3.040.000,00	3.040.000,00
- Belanja sewa alat studio	6.600.000,00	5.800.000,00
- Belanja sewa alat musik dan soundsystem	3.000.000,00	3.000.000,00
Total Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.640.000,00	11.840.000,00

i. Belanja Makanan dan Minuman	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja makanan dan minuman harian pegawai	207.700.000,00	207.697.000,00
- Belanja makanan dan minuman rapat	31.125.000,00	23.540.000,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan	214.155.000,00	209.125.000,00
Total Belanja Makanan dan Minuman	452.980.000,00	440.362.000,00

j. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	178.480.000,00	178.480.000,00
- Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	13.800.000,00	13.800.000,00
Total Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	192.280.000,00	192.280.000,00

k. Belanja Pakaian Kerja	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja pakaian kerja lapangan	60.320.000,00	60.310.000,00
Total Belanja Pakaian Kerja	60.320.000,00	60.310.000,00

l. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja pakaian olahraga	319.000,00	0,00
Total Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	319.000,00	0,00

m. Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	556.130.000,00	549.940.000,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah	325.760.000,00	322.161.999,00
Total Belanja Perjalanan Dinas	881.890.000,00	872.101.999,00

n. Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja pemeliharaan komputer	20.500.000,00	20.347.000,00
- Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi	2.000.000,00	1.980.000,00
Total Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	22.327.000,00

o. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS	44.200.000,00	40.400.000,00
Total Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	44.200.000,00	40.400.000,00

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2.2 BELANJA MODAL	935.400.000,00	908.651.100,00	2.454.850.250,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 908.651.100,00** atau **97,14%**. Terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 312.847.000,00 atau 96,89% serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 595.804.100,00 atau 97,27%.

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	322.900.000,00	312.847.000,00	2.270.855.750,00

Pada Tahun 2018 Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 322.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 312.847.000,00 atau 96,89%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut:

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	119.000.000,00	111.250.000,00	2.083.586.750,00
b. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	5.962.000,00	12.320.000,00
c. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	29.000.000,00	28.875.000,00	0,00
d. Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.500.000,00	9.405.000,00	35.775.000,00
e. Belanja Modal Pengadaan Mebeler	74.100.000,00	73.790.000,00	49.257.500,00
f. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00	2.000.000,00	9.663.500,00
g. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	0,00	0,00	1.540.000,00

h. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	16.350.000,00	16.135.000,00	17.963.000,00
i. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5.950.000,00	5.800.000,00	0,00
j. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	47.000.000,00	45.780.000,00	52.250.000,00
k. Belanja Modal Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor yang Dikapitalisasi	14.000.000,00	13.850.000,00	8.500.000,00
Total Belanja Modal Peralatan dan Mesin	322.900.000,00	312.847.000,00	2.270.855.750,00

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini :

a. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	118.000.000,00	111.250.000,00
- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	1.000.000,00	0,00
Total BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	119.000.000,00	111.250.000,00

b. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan mesin penghisap debu/vacuum cleaner	6.000.000,00	5.962.000,00
Total BM Pengadaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	5.962.000,00

c. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan almari	22.000.000,00	21.945.000,00
- Belanja modal pengadaan papan nama kantor	7.000.000,00	6.930.000,00
Total BM Pengadaan Perlengkapan Kantor	29.000.000,00	28.875.000,00

d. Belanja Modal Pengadaan Komputer	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan komputer note book	7.000.000,00	6.930.000,00
- Belanja modal pengadaan printer	2.500.000,00	2.475.000,00
Total BM Pengadaan Komputer	9.500.000,00	9.405.000,00

e. Belanja Modal Pengadaan Mebeler	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan meja makan	2.500.000,00	2.450.000,00
- Belanja modal pengadaan kursi kerja	5.600.000,00	5.550.000,00
- Belanja modal pengadaan rak buku/ tv/kembang	1.000.000,00	990.000,00
- Belanja modal pengadaan penyekat ruangan	65.000.000,00	64.800.000,00
Total BM Pengadaan Mebeler	74.100.000,00	73.790.000,00

f. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan pompa air	2.000.000,00	2.000.000,00
Total BM Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00	2.000.000,00

h. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan amplifier	2.500.000,00	2.400.000,00
- Belanja modal pengadaan microphone	1.400.000,00	1.350.000,00
- Belanja modal pengadaan CCTV	12.450.000,00	12.385.000,00
Total BM Pengadaan Alat-alat Studio	16.350.000,00	16.135.000,00

i. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan generator	5.950.000,00	5.800.000,00
Total BM Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5.950.000,00	5.800.000,00

j. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan sarana penanggulangan bencana	47.000.000,00	45.780.000,00
Total BM Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	47.000.000,00	45.780.000,00

k. Belanja Modal Rehabilitasi/ pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor yang Dikapitalisasi	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up yang dikapitalisasi	14.000.000,00	13.850.000,00
Total BM Pengadaan pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor yang Dikapitalisasi	14.000.000,00	13.850.000,00

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	612.500.000,00	595.804.100,00	152.017.000,00

Pada Tahun 2018 Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 612.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 595.804.100,00 atau 97,27%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian*) Bangunan	525.000.000,00	508.922.000,00	127.452.000,00
b. Belanja Modal Rehabilitasi/ pemeliharaan Bangunan yang Dikapitalisasi	87.500.000,00	86.882.100,00	24.565.000,00
Total Belanja Modal Gedung dan Bangunan	612.500.000,00	595.804.100,00	152.017.000,00

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini :

a. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian*) Bangunan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian kanopi	125.000.000,00	124.802.000,00
- Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian jalan aspal/beton /paving di lingkungan gedung/kantor	400.000.000,00	384.120.000,00
Total Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian*) Bangunan	525.000.000,00	508.922.000,00

b. Belanja Modal Rehabilitasi/ pemeliharaan Bangunan yang Dikapitalisasi	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal rehabilitasi/ pemeliharaan gedung kantor yang dikapitalisasi	87.500.000,00	86.882.100,00
Total Belanja Modal Rehabilitasi/ pemeliharaan Bangunan yang Dikapitalisasi	87.500.000,00	86.882.100,00

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp.5.884.482.335,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 553.630,00, Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 5.883.928.705,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 0,00. Nilai Kewajiban sebesar Rp. 5.868.267,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 5.878.614.068,00.

Secara umum rincian Laporan Neraca Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1. ASET	5.884.482.335,00	5.819.415.303,62
2. KEWAJIBAN	5.868.267,00	10.799.416,00
3. EKUITAS	5.878.614.068,00	5.808.615.887,62

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1. ASET	5.884.482.335,00	5.819.415.303,62

Nilai Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 5.884.482.335,00 dan Rp.5.819.415.303,62. Terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.1 ASET LANCAR	553.630,00	0,00
1.2 ASET TETAP	5.883.928.705,00	5.819.415.303,62
1.3 ASET LAINNYA	0,00	0,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.1 ASET LANCAR	553.630,00	0,00

Nilai Aset Lancar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 553.630,00 dan Rp. 0,00. Terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 0,00.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.1.2 Persediaan	553.630,00	0,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp.553.630,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
a. Persediaan Alat Tulis Kantor	553.630,00	0,00
Total Persediaan	553.630,00	0,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.2 ASET TETAP	5.883.928.705,00	5.819.415.303,62

Nilai Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 5.883.928.705,00 dan Rp.5.819.415.303,62. Terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.2.1 Tanah	30.850.000,00	30.850.000,00

Nilai Perolehan Tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar sebesar Rp. 30.850.000,00. **Tanah dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB-A) Tanah**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Tanah:	30.850.000,00	30.850.000,00
- Tanah Kantor	30.850.000,00	30.850.000,00
Jumlah	30.850.000,00	30.850.000,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.2.2 Peralatan dan Mesin	6.545.144.055,00	6.285.985.750,00

Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp.6.545.144.055,00 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 6.285.985.750,00. **Peralatan dan Mesin dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB-B) Peralatan dan Mesin untuk nilai di atas/sama dengan Rp. 300.00,00**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Alat-alat Angkutan:	5.419.165.505,00	5.276.024.200,00
- Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	5.419.165.505,00	5.276.024.200,00
Alat Bengkel:	4.455.000,00	4.455.000,00
- Alat-alat Bengkel	4.455.000,00	4.455.000,00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga:	708.801.300,00	654.699.300,00
- Peralatan Kantor	46.359.000,00	40.397.000,00
- Perlengkapan Kantor	138.877.500,00	111.132.500,00
- Komputer	270.291.800,00	260.886.800,00
- Meubelair	194.834.500,00	185.884.500,00
- Peralatan Dapur	14.563.500,00	12.563.500,00
- Penghias Ruangan Rumah Tangga	43.875.000,00	43.875.000,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi:	159.197.500,00	143.062.500,00
- Alat-alat Studio	126.913.000,00	110.778.000,00

- Alat-alat Komunikasi	32.284.500,00	32.284.500,00
Alat Keamanan:	253.524.750,00	207.744.750,00
- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	253.524.750,00	207.744.750,00
Jumlah	6.545.144.055,00	6.285.985.750,00

Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin di Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar **Rp. 259.158.305,00 atau 104,12%**. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2018		Rp. 6.285.985.750,00
Penambahan Tahun 2018	Rp. 330.888.305,00	
Pengurangan Tahun 2018	Rp. 71.730.000,00	
Mutasi Tahun 2018		Rp. 259.158.305,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2018		Rp. 6.545.144.055,00
Akumulasi Penyusutan		Rp. (3.578.726.310,28)
Nilai Buku per 31 Desember 2018		Rp. 2.966.417.744,72

Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2018 sebesar **Rp. 330.888.305,00** berasal dari:

1. Pengadaan Tahun Anggaran 2018	Rp. 312.847.000,00
2. Mutasi dari OPD lain	Rp. 18.041.305,00
Jumlah	Rp. 330.888.305,00

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini:

1. Pengadaan Tahun Anggaran 2018

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 312.847.000,00** berasal dari Realisasi Belanja Modal (Pengadaan Tahun Anggaran 2018) yang memenuhi syarat kapitalisasi nilai aset di atas Rp. 300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Alat-alat Angkutan:	Rp. 125.100.000,00
- Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 125.100.000,00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga:	Rp. 125.832.000,00
- Peralatan Kantor	Rp. 5.962.000,00
- Perlengkapan Kantor	Rp. 34.675.000,00
- Komputer	Rp. 9.405.000,00

- Meubelair	Rp.	73.790.000,00
- Peralatan Dapur	Rp.	2.000.000,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi:	Rp.	16.135.000,00
- Alat-alat Studio	Rp.	16.135.000,00
Alat Keamanan:	Rp.	45.780.000,00
- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Rp.	45.780.000,00
Jumlah	Rp.	312.847.000,00

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini:

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	125.100.000,00
- Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up		
1 unit @ Rp. 108.150.000,00	Rp.	108.150.000,00
Biaya Perolehan	Rp.	3.100.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan	Rp.	13.850.000,00
	Rp.	125.100.000,00
Peralatan Kantor	Rp.	5.962.000,00
- Mesin Penghisap Debu		
1 unit @ Rp. 2.970.000,00	Rp.	2.970.000,00
1 unit @ Rp. 2.992.000,00	Rp.	2.992.000,00
	Rp.	5.962.000,00
Perlengkapan Kantor	Rp.	34.675.000,00
- Almari		
1 unit @ Rp. 5.995.000,00	Rp.	5.995.000,00
2 unit @ Rp. 7.975.000,00	Rp.	15.950.000,00
	Rp.	21.945.000,00
- Papan Nama Kantor		
1 set @ Rp. 6.930.000,00	Rp.	6.930.000,00
- Generator		
1 unit @ Rp. 5.800.000,00	Rp.	5.800.000,00
Komputer	Rp.	9.405.000,00
- Komputer Notebook		
1 unit @ Rp. 6.930.000,00	Rp.	6.930.000,00
- Printer		
1 unit @ Rp. 2.475.000,00	Rp.	2.475.000,00

Meubelair	Rp.	73.790.000,00
- Meja Makan		
1 unit @ Rp. 2.450.000,00	Rp.	2.450.000,00
- Kursi Kerja		
4 unit @ Rp. 1.275.000,00	Rp.	5.100.000,00
Biaya Perolehan	Rp.	450.000,00
	Rp.	5.550.000,00
- Rak buku/TV/kembang		
1 unit @ Rp. 990.000,00	Rp.	990.000,00
- Penyekat Ruangan		
1 paket @ Rp. 64.350.000,00	Rp.	64.350.000,00
Biaya Perolehan	Rp.	450.000,00
	Rp.	64.800.000,00
Peralatan Dapur	Rp.	2.000.000,00
- Pompa Air		
1 unit @ Rp. 2.000.000,00	Rp.	2.000.000,00
Alat-alat Studio	Rp.	16.135.000,00
- Amplifier		
1 unit @ Rp. 2.400.000,00	Rp.	2.400.000,00
- Microphone		
2 unit @ Rp. 675.000,00	Rp.	1.350.000,00
- CCTV		
1 paket @ Rp. 11.935.000,00	Rp.	11.935.000,00
Biaya Perolehan	Rp.	450.000,00
	Rp.	12.385.000,00
Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Rp.	45.780.000,00
- Alat Sarana Penanggulangan Bencana		
Nozzel/Stick semprot air : 1 unit @ Rp. 3.000.000,00	Rp.	3.000.000,00
Selang Pemadam : 1 unit @ Rp. 2.300.000,00	Rp.	2.300.000,00
Warepack : 18 unit @ Rp. 535.000,00	Rp.	9.630.000,00
Safety Shoes : 18 pasang @ Rp. 1.225.000,00	Rp.	22.050.000,00
Sarung Tangan : 18 pasang @ Rp. 300.000,00	Rp.	5.400.000,00
Masker pernapasan : 4 unit @ Rp. 850.000,00	Rp.	3.400.000,00
	Rp.	45.780.000,00
	Rp.	312.847.000,00

2. Mutasi dari OPD lain

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang merupakan mutasi dari OPD lain sebesar **Rp. 18.041.305,00** dengan rincian sebagai berikut:

- Kecamatan Blora	Rp.	18.041.305,00
Jumlah	Rp.	18.041.305,00

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini:

Kecamatan Blora

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	18.041.305,00
- Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 1 unit @ Rp. 18.041.305,00	Rp.	18.041.305,00
Jumlah	Rp.	18.041.305,00

Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2018 sebesar **Rp. 71.730.000,00** berasal dari:

1. Reklasifikasi Aset Tetap	Rp.	71.730.000,00
Jumlah	Rp.	71.730.000,00

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini:

1. Reklasifikasi Aset Tetap

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan karena adanya reklasifikasi Aset Tetap sebesar **Rp. 71.730.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Perlengkapan Kantor	Rp.	6.930.000,00
- Papan Nama Kantor	Rp.	6.930.000,00
Meubelair	Rp.	64.800.000,00
- Penyekat Ruangan	Rp.	64.800.000,00
Jumlah	Rp.	71.730.000,00

Aset Tetap tersebut direklasifikasi menjadi Aset Tetap Gedung Kantor (Gedung dan Bangunan). Hal tersebut dikarenakan pengakuan Aset Tetap Papan Nama Kantor dan Penyekat Ruangan dinilai menambah masa manfaat dan nilai Gedung Kantor.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.2.3 Gedung dan Bangunan	2.944.274.500,00	2.363.622.500,00

Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.944.274.500,00 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.363.622.500,00.

Gedung dan Bangunan dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB-C) Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Bangunan Gedung:	2.944.274.500,00	2.363.622.500,00
- Gedung Kantor	2.944.274.500,00	2.363.622.500,00
Jumlah	2.944.274.500,00	2.363.622.500,00

Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan di Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar **Rp. 580.652.000,00 atau 124,57%**. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2018	Rp. 2.363.622.500,00
Penambahan Tahun 2018	Rp. 667.534.100,00
Pengurangan Tahun 2018	Rp. 86.882.100,00
Mutasi Tahun 2018	Rp. 580.652.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp. 2.944.274.500,00
Akumulasi Penyusutan	Rp. (135.865.896,67)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp. 2.808.408.603,33

Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2018 sebesar **Rp.667.534.100,00** berasal dari Pengadaan Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- Gedung Kantor

Rincian :

Kanopi	Rp. 124.802.000,00
Konstruksi Kanopi	Rp. 114.815.000,00
Jasa Perencanaan	Rp. 5.555.000,00
Jasa Pengawasan	Rp. 3.707.000,00
Lain-lain (Honor Tim Pengadaan)	Rp. 725.000,00

Paving	Rp.	384.120.000,00
Konstruksi Paving	Rp.	353.114.000,00
Jasa Perencanaan	Rp.	15.950.000,00
Jasa Pengawasan	Rp.	13.431.000,00
Lain-lain (Honor Tim Pengadaan)	Rp.	1.625.000,00
Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp.	86.882.100,00
Pemeliharaan Gedung	Rp.	85.982.100,00
Lain-lain (Honor Tim Pengadaan)	Rp.	900.000,00
Papan Nama Kantor	Rp.	6.930.000,00
Papan Nama Kantor	Rp.	6.930.000,00
Penyekat Ruangan	Rp.	64.800.000,00
Penyekat Ruangan	Rp.	64.800.000,00
Jumlah		667.534.100,00

Papan Nama Kantor dan Penyekat Ruangan merupakan Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Meubelair (Peralatan dan Mesin) yang direklasifikasi menjadi Gedung Kantor (Gedung dan Bangunan).

Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2018 sebesar **Rp. 86.882.100,00** berasal dari Belanja Modal Rehabilitasi/pemeliharaan Gedung Kantor yang tidak diakui sebagai Aset Tetap dan dikelompokkan menjadi Beban Lain-lain pada Laporan Operasional.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	76.956.000,00	76.956.000,00

Nilai Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 76.956.000,00. **Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB-D) Jalan, Irigasi dan Jaringan**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Jaringan:	76.956.000,00	76.956.000,00
- Instalasi Listrik	66.181.000,00	66.181.000,00
- Instalasi Telepon	10.775.000,00	10.775.000,00
Jumlah	76.956.000,00	76.956.000,00

Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, Nilai Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan di Tahun 2018 tidak mengalami perubahan. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2018	Rp. 76.956.000,00
Penambahan Tahun 2018	Rp. 0,00
Pengurangan Tahun 2018	Rp. 0,00
Mutasi Tahun 2018	Rp. 76.956.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp. 76.956.000,00
Akumulasi Penyusutan	Rp. (8.813.743,05)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp. 68.142.256,95

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.2.5 Aset Tetap Lainnya	10.110.100,00	10.110.100,00

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 10.110.100,00. Aset Tetap Lainnya merupakan merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Aset tersebut berupa Buku di Perpustakaan sebesar Rp. 10.110.100,00. **Aset Tetap Lainnya dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB-E) Aset Tetap Lainnya**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Buku dan Perpustakaan:	10.110.100,00	10.110.100,00
- Buku Peraturan Perundang-undangan	10.110.100,00	10.110.100,00
Jumlah	10.110.100,00	10.110.100,00

Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya di Tahun 2018 tidak mengalami perubahan. Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2018	Rp. 10.110.100,00
Penambahan Tahun 2018	Rp. 0,00
Pengurangan Tahun 2018	Rp. 0,00
Mutasi Tahun 2018	Rp. 0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp. 10.110.100,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.2.6 Akumulasi Penyusutan	(3.723.405.950,00)	(2.948.109.046,38)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp.(3.723.405.950,00) dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. (2.948.109.046,38).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra Akun Aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)
1. Peralatan dan Mesin	(3.578.726.310,28)
- Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	(2.818.172.204,02)
- Alat-alat Bengkel	(1.782.000,00)
- Peralatan Kantor	(29.020.737,50)
- Perlengkapan Kantor	(85.174.116,66)
- Komputer	(232.098.883,33)
- Meubelair	(123.951.083,34)
- Peralatan Dapur	(3.301.308,34)
- Penghias Ruangan Rumah Tangga	(12.155.750,00)
- Alat-alat Studio	(88.013.904,16)
- Alat-alat Komunikasi	(27.410.383,34)
- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	(157.645.939,59)
2. Gedung dan Bangunan	(135.865.896,67)
- Gedung Kantor	(135.865.896,67)
3. Jalan, Jaringan dan Instalasi	(8.813.743,05)
- Instalasi Listrik	(6.434.263,88)
- Jaringan Telepon	(2.379.479,17)
Jumlah	(3.723.405.950,00)

Barang Inventaris yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset (nilai di bawah Rp. 300.000,-)

Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-B) Peralatan dan Mesin telah dikelompokkan tersendiri barang-barang dengan nilai **di bawah Rp. 300.00,00**. Pengurus Barang mengklasifikasikan barang-barang tersebut sebagai barang Inventaris. Saldo barang Inventaris tersebut per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sejumlah **Rp. 14.165.650,00**. Peralatan dan Mesin tersebut tidak termasuk ke dalam Aset Tetap, dicatat di **Kartu Inventaris Barang (KIB-B) Peralatan dan Mesin untuk nilai di bawah Rp. 300.00,00**, dengan rincian sebagai berikut:

Peralatan Kantor:	Rp.	2.192.600,00
- Kipas Angin	Rp.	2.192.600,00
Perlengkapan Kantor:	Rp.	3.116.500,00
- Almari	Rp.	225.000,00
- Filling Kabinet	Rp.	895.000,00
- Whiteboard	Rp.	346.000,00
- Papan Pengumuman	Rp.	395.500,00
- Lambang Garuda Pancasila	Rp.	270.000,00
- Lambang Presiden dan Wakil Presiden	Rp.	270.000,00
- Tiang Bendera	Rp.	715.000,00
Komputer:	Rp.	550.000,00
- UPS/stabilizer	Rp.	175.000,00
- Kelengkapan Komputer (flashdisk, mouse, keyboard, harddisk, speaker)	Rp.	375.000,00
Meubelair:	Rp.	4.935.250,00
- Kursi Kerja	Rp.	48.000,00
- Rak buku/TV/kembang	Rp.	606.250,00
- Kursi lipat	Rp.	4.281.000,00
Peralatan Dapur:	Rp.	48.000,00
- Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	Rp.	48.000,00
Penghias Ruangan Rumah Tangga:	Rp.	299.500,00
- Jam dinding/meja	Rp.	275.000,00
- Cermin Hias	Rp.	24.500,00
Alat-alat Studio:	Rp.	415.000,00
- TV	Rp.	170.000,00
- Wireless	Rp.	245.000,00

Alat-alat Komunikasi:	Rp.	41.300,00
- Telepon	Rp.	41.300,00
Alat-alat Persenjataan/Keamanan:	Rp.	2.567.500,00
- Sentolop/Senter	Rp.	1.342.500,00
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Rp.	1.225.000,00
Jumlah	Rp.	14.165.650,00

Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, Nilai Perolehan barang Inventaris tersebut di Tahun 2018 tidak mengalami perubahan. Mutasi barang Inventaris tersebut di Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2018	Rp.	14.165.650,00
Penambahan Tahun 2018	Rp.	0,00
Pengurangan Tahun 2018	Rp.	0,00
Mutasi Tahun 2018	Rp.	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp.	14.165.650,00
Akumulasi Penyusutan	Rp.	(12.615.366,67)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp.	1.550.283,33

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
2. KEWAJIBAN	5.868.267,00	10.799.416,00

Nilai Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 5.868.267,00 dan Rp.10.799.416,00. Terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.868.267,00	10.799.416,00

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 5.868.267,00 dan Rp. 10.799.416,00. Terdiri dari Utang Jangka Pendek Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
2.1.1 Utang Jangka Pendek Lainnya	5.868.267,00	10.799.416,00

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 5.868.267,00 dan Rp. 10.799.416,00. Utang Jangka Pendek merupakan utang yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan. Untuk Utang Jangka Pendek Tahun 2017 sudah dibayarkan di Bulan Januari 2018. Sedangkan Utang Jangka Pendek Tahun 2018 tersebut antara lain Beban Telepon dan Listrik, dengan rincian sebagai berikut:

- Beban Telepon	Rp.	631.414,00
- Beban Listrik	Rp.	5.236.853,00
Jumlah	Rp.	5.868.267,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
3. EKUITAS	5.878.614.068,00	5.808.615.887,62

Nilai Jumlah Ekuitas tersebut merupakan selisih antara Ekuitas dan RK PPKD dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
3.1 EKUITAS	(3.336.526.842,00)	(4.351.351.406,38)

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. (3.336.526.842,00) dan Rp. (4.351.351.406,38). Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
3.2 RK PPKD	9.215.140.910,00	10.159.967.294,00

Nilai RK PPKD per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 9.215.140.910,00 dan Rp. 10.159.967.294,00. Jumlah RK PPKD merupakan jumlah realisasi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang kemudian akan dikonsolidasikan dengan BPPKAD selaku PPKD.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp. 0,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp. 9.145.142.729,62, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 9.145.142.729,62. Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 0,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0,00, sehingga Defisit-LO sebesar Rp. 9.145.142.729,62.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1. PENDAPATAN-LO	0,00	0,00	0,00
2. BEBAN	9.145.142.729,62	8.467.420.531,68	677.722.197,94
3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(9.145.142.729,62)	(8.467.420.531,68)	(677.722.197,94)
4. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00
5. POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00
6. SURPLUS/DEFISIT- LO	(9.145.142.729,62)	(8.467.420.531,68)	(677.722.197,94)

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1. PENDAPATAN-LO	0,00	0,00	0,00

Jumlah Pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 0,00.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2. BEBAN	9.145.142.729,62	8.467.420.531,68	677.722.197,94

Jumlah Beban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 9.145.142.729,62 dan Rp.8.467.420.531,68. Terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp. 5.966.757.789,00, Beban Persediaan sebesar Rp. 373.909.486,00, Beban Jasa sebesar Rp.1.065.908.757,00, Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 22.327.000,00, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 872.101.999,00, Beban Penyusutan sebesar Rp.757.255.598,62 dan Beban Lain-lain Rp. 86.882.100,00.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2.1 BEBAN PEGAWAI	5.966.757.789,00	5.506.829.194,00	459.928.595,00

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 5.966.757.789,00 dan Rp. 5.506.829.194,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
a. Beban Gaji dan Tunjangan	2.539.572.589,00	2.568.800.394,00	(29.227.805,00)
b. Beban Tambahan Penghasilan PNS	994.521.200,00	863.388.800,00	131.132.400,00
c. Beban Honorarium PNS	212.740.000,00	153.440.000,00	59.300.000,00
d. Beban Honorarium Non PNS	2.219.924.000,00	1.921.200.000,00	298.724.000,00
Jumlah Beban Pegawai	5.966.757.789,00	5.506.829.194,00	459.928.595,00

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini :

a. Beban Gaji dan Tunjangan	2018 (Rp)
- Beban Gaji pokok PNS/uang representasi	1.944.341.000,00
- Beban Tunjangan keluarga	195.646.378,00
- Beban Tunjangan jabatan	145.995.000,00
- Beban Tunjangan fungsional umum	73.995.000,00
- Beban Tunjangan beras	107.471.280,00
- Beban Tunjangan PPh/tunjangan khusus	2.127.958,00
- Beban Pembulatan gaji	28.387,00
- Beban luran asuransi kesehatan	55.121.784,00
- Beban luran asuransi kecelakaan kerja dan kematian	14.845.802,00
Total Beban Gaji dan Tunjangan	2.539.572.589,00

b. Beban Tambahan Penghasilan PNS	2018 (Rp)
- Beban Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	994.521.200,00
Total Beban Tambahan Penghasilan PNS	994.521.200,00

c. Beban Honorarium PNS	2018 (Rp)
- Beban Honorarium panitia pelaksana dan peserta kegiatan PNS	105.340.000,00
- Beban Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	2.450.000,00
- Beban Honorarium pengelola administrasi keuangan dan barang daerah	104.950.000,00
Total Beban Honorarium PNS	212.740.000,00

d. Beban Honorarium Non PNS	2018 (Rp)
- Beban Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	1.834.164.000,00
- Beban Honorarium panitia pelaksana dan peserta kegiatan non PNS	385.760.000,00
Total Beban Honorarium Non PNS	2.219.924.000,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2.2 BEBAN PERSEDIAAN	373.909.486,00	284.271.850,00	89.637.636,00

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 373.909.486,00 dan Rp. 284.271.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
a. Beban Bahan Pakai Habis	334.167.486,00	250.019.800,00	84.147.686,00
b. Beban Cetak & Penggandaan	39.742.000,00	34.252.050,00	5.489.950,00
Jumlah Beban Persediaan	373.909.486,00	284.271.850,00	89.637.636,00

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini :

a. Beban Bahan Pakai Habis	2018 (Rp)
- Beban alat tulis kantor	42.182.870,00
- Beban alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	30.860.000,00
- Beban perangko, materai dan benda pos lainnya	2.940.000,00
- Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.931.000,00
- Beban bahan bakar minyak/gas	89.513.616,00
- Beban pengisian tabung pemadam kebakaran	5.000.000,00
- Beban barang kebutuhan peserta diklat/sosialisasi	142.600.000,00
- Beban spanduk	7.300.000,00
- Beban baliho/banner	3.840.000,00
Total Beban Bahan Pakai Habis	334.167.486,00

b. Beban Cetak dan Penggandaan	2018 (Rp)
- Beban cetak	18.590.000,00
- Beban penggandaan	21.152.000,00
Total Beban Cetak dan Penggandaan	39.742.000,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2.3 BEBAN JASA	1.065.908.757,00	1.127.689.428,00	(61.780.671,00)

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 1.065.908.757,00 dan Rp. 1.127.689.428,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
a. Beban Jasa Kantor	80.059.887,00	96.357.728,00	(16.297.841,00)
b. Beban Premi Asuransi	1.689.120,00	153.000,00	1.536.120,00
c. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	218.367.750,00	160.872.700,00	57.495.050,00
d. Beban Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	600.000,00	1.300.000,00	(700.000,00)
e. Beban Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	29.000.000,00	(9.000.000,00)
f. Beban Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor	11.840.000,00	15.300.000,00	(3.460.000,00)
g. Beban Makanan dan Minuman	440.362.000,00	504.011.000,00	(63.649.000,00)
h. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	192.280.000,00	192.775.000,00	(495.000,00)
i. Beban Pakaian Kerja	60.310.000,00	91.370.000,00	(31.060.000,00)
j. Beban Jasa Konsultasi	40.400.000,00	36.550.000,00	3.850.000,00
Jumlah Beban Jasa	1.065.908.757,00	1.127.689.428,00	(61.780.671,00)

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini :

a. Beban Jasa Kantor	2018 (Rp)
- Beban telepon	8.260.239,00
- Beban air	8.970.000,00
- Beban listrik	61.839.648,00
- Beban surat kabar/majalah	990.000,00
Total Beban Jasa Kantor	80.059.887,00

b. Beban Premi Asuransi	2018 (Rp)
- Beban premi asuransi kesehatan	1.689.120,00
Total Beban Premi Asuransi	1.689.120,00

c. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	2018 (Rp)
- Beban jasa service	36.130.000,00
- Beban penggantian suku cadang	140.708.725,00
- Beban pelumas	18.144.250,00
- Beban surat tanda nomor kendaraan	23.384.775,00
Total Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	218.367.750,00

d. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2018 (Rp)
- Beban sewa gedung/kantor/tempat	600.000,00
Total Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00

e. Beban Sewa Sarana Mobilitas	2018 (Rp)
- Beban sewa sarana mobilitas darat	20.000.000,00
Total Beban Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00

f. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2018 (Rp)
- Beban sewa meja kursi	3.040.000,00
- Beban sewa alat studio	5.800.000,00
- Beban sewa alat musik dan soundsystem	3.000.000,00
Total Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.840.000,00

g. Beban Makanan dan Minuman	2018 (Rp)
- Beban makanan dan minuman harian pegawai	207.697.000,00
- Beban makanan dan minuman rapat	23.540.000,00
- Beban makanan dan minuman kegiatan	209.125.000,00
Total Beban Makanan dan Minuman	440.362.000,00

h. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	2018 (Rp)
- Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	178.480.000,00
- Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	13.800.000,00
Total Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	192.280.000,00

i. Beban Pakaian Kerja	2018 (Rp)
- Beban pakaian kerja lapangan	60.310.000,00
Total Beban Pakaian Kerja	60.310.000,00

j. Beban Jasa Konsultansi	2018 (Rp)
- Beban jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS	40.400.000,00
Total Beban Jasa Konsultansi	40.400.000,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2.4 BEBAN PEMELIHARAAN	22.327.000,00	25.871.000,00	(3.544.000,00)

Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 22.327.000,00 dan Rp. 25.871.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
a. Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	4.431.000,00	(4.431.000,00)
b. Beban Pemeliharaan Komputer	20.347.000,00	20.840.000,00	(493.000,00)
c. Beban Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	1.980.000,00	600.000,00	1.380.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	22.327.000,00	25.871.000,00	(3.544.000,00)

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2.5 BEBAN PERJALANAN DINAS	872.101.999,00	768.519.000,00	103.582.999,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 872.101.999,00 dan Rp. 768.519.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
a. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	549.940.000,00	480.664.000,00	69.276.000,00
b. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	322.161.999,00	287.855.000,00	34.306.999,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	872.101.999,00	768.519.000,00	103.582.999,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2.6 BEBAN PENYUSUTAN	757.255.598,62	729.675.059,68	27.580.538,94

Jumlah Beban Penyusutan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 757.255.598,62 dan Rp. 729.675.059,68 dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
a. Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	707.111.738,62	682.696.866,35	24.414.872,27
b. Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	47.399.079,67	44.233.410,00	3.165.669,67
c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	2.744.783,33	2.744.783,33	0,00
Jumlah Beban Penyusutan	757.255.598,62	729.675.059,68	27.580.538,94

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini :

a. Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	2018 (Rp)
- Beban Penyusutan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	565.288.303,21
- Beban Penyusutan Alat Bengkel	445.500,00
- Beban Penyusutan Peralatan Kantor	6.248.983,33
- Beban Penyusutan Perlengkapan Kantor	20.153.016,67
- Beban Penyusutan Komputer	31.411.729,16
- Beban Penyusutan Mebelair	27.135.733,33
- Beban Penyusutan Peralatan Dapur	2.021.016,67
- Beban Penyusutan Penghias Ruangan Rumah Tangga	6.293.500,00
- Beban Penyusutan Alat-Alat Studio	14.500.608,33
- Beban Penyusutan Alat-alat Komunikasi	3.561.900,00
- Beban Penyusutan Alat-Alat Persenjataan Keamanan	30.051.447,92
Total Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	707.111.738,62

b. Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	2018 (Rp)
- Beban Penyusutan Gedung Kantor	47.399.079,67
Total Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	47.399.079,67

c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	2018 (Rp)
- Beban Penyusutan Instalasi Listrik dan Telpon	2.744.783,33
Total Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	2.744.783,33

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2.7 BEBAN LAIN-LAIN	88.882.100,00	24.565.000,00	62.317.100,00

Jumlah Beban Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 88.882.100,00 dan Rp. 24.565.000,00. Beban Lain-lain ini merupakan akibat dari Belanja Modal yang tidak dapat dikelompokkan menjadi Aset Tetap yaitu Gedung Kantor. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Pengurus Aset, Belanja Modal rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor yang dikapitalisasi tidak dapat dikelompokkan menjadi Aset hal ini dikarenakan hanya bersifat pemeliharaan dan tidak menambah nilai manfaat aset Gedung Kantor.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 5.808.615.887,62 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 9.145.142.729,62 kemudian ditambah koreksi/perubahan nilai Aset Tetap sebesar Rp. 0,00, sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. (3.336.526.842,00).

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1. EKUITAS AWAL	5.808.615.887,62	2.912.713.776,44
2. SURPLUS/DEFISIT-LO	(9.145.142.729,62)	(8.467.420.531,68)
3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : KOREKSI NILAI ASET TETAP	0,00	1.203.355.348,86
4. RK PPKD	0,00	10.159.967.294,00
5. EKUITAS AKHIR	(3.336.526.842,00)	5.808.615.887,62

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1. EKUITAS AWAL	5.808.615.887,62	2.912.713.776,44

Ekuitas Awal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 5.808.615.887,62 dan Rp. 2.912.713.776,44. Jumlah Ekuitas Awal tersebut berasal dari Jumlah Ekuitas Akhir pada periode Tahun sebelumnya setelah dilakukan konsolidasi dengan Akun RK PPKD yang terdapat pada Laporan Neraca.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
2. SURPLUS/DEFISIT-LO	(9.145.142.729,62)	(8.467.420.531,68)

Nilai Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. (9.145.142.729,62) dan Rp. (8.467.420.531,68). Defisit-LO per 31 Desember 2018 merupakan selisih kurang antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa pada Laporan Operasional.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : KOREKSI NILAI ASET TETAP	0,00	1.203.355.348,86

Koreksi Nilai Aset Tetap untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 1.203.355.348,86. Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan selisih antara penambahan dan pengurangan Ekuitas pada Jurnal Penyesuaian. Tahun 2018 tidak ada koreksi Aset Tetap yang mengakibatkan perubahan pada Ekuitas.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
4. RK PPKD	0,00	10.159.967.294,00

Nilai RK PPKD untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 10.159.967.294,00. RK PPKD tersebut merupakan hasil dari konsolidasi dengan Akun RK PPKD yang terdapat pada Laporan Neraca.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
5. EKUITAS AKHIR	(3.336.526.842,00)	(4.351.351.406,38)

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. (3.336.526.842,00) dan Rp. (4.351.351.406,38). Ekuitas Akhir tersebut merupakan hasil dari Ekuitas Awal dikurangi Defisit-LO dan Koreksi Nilai Aset Tetap.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah yang menjadi dasar nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora pada tanggal 26 September 2016 lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora pada tanggal 16 Desember 2016.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran. Dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat, membawahkan:

- Subbagian Program dan Keuangan; dan
- Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
 - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 - Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - Seksi Kerjasama Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat; dan
 - Seksi Pemadam Kebakaran.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Tugas
- Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kebakaran.
4. Fungsi
- Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi yaitu:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
 - d. Pelaksanaan administrasi penegakkan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan kebakaran; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai perintah Bupati.

Kepegawaian (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora Tahun 2018 meliputi:

- Jumlah Pegawai : (41 orang)
- Kualifikasi Pendidikan : SMA (22 orang), Diploma III (1 orang), Diploma IV (1 orang), Strata I (15 orang), Strata II (3 orang)
- Golongan : Gol. II (17 orang), Gol. III (19 orang), Gol. IV (5 orang)
- Jumlah Pejabat Struktural (12 orang)
- Jenis Kelamin : Laki-laki (37 orang) dan Perempuan (4 orang)
- Pejabat Fungsional tidak ada

Dalam Tahun 2018 terjadi perubahan jumlah pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora, semula 42 orang (tahun 2017) menjadi 41 orang (tahun 2018). Perubahan tersebut dikarenakan adanya Pegawai yang memasuki batas usia Pensiun (Purna Tugas) sebanyak 2 orang, mutasi dari OPD lain sebanyak 2 orang dan mutasi ke OPD lain sebanyak 1 orang.

Lokasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora terletak di Jalan Blora – Cepu Km 5 Jepon Blora.

BAB VII

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora telah melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 dengan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat membantu manajemen dan para pengguna Laporan Keuangan dalam rangka pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora khususnya dan Pemerintah Kabupaten Blora pada umumnya dimasa yang akan datang.

Dengan demikian diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Blora, 31 Desember 2018

Kepala OPD

ANANG SRI DANARYANTO, S.Sos. MMA

Pembina Utama Muda
NIP. 19700405 199001 1 002